

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bandung terletak di antara 107036' Bujur Timur dan 6055' Lintang Selatan dengan luas 167,29 km². Secara geografis, Kota Bandung berada di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, dengan demikian sebagai ibu kota provinsi, Kota Bandung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Wilayah Kota Bandung di bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Di bagian Selatan, Kota Bandung berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Di bagian Barat, Kota Bandung berbatasan dengan Kota Cimahi. Di bagian Timur, Kota Bandung berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Kota Bandung memiliki 30 Kecamatan yang terdiri dari Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Regol, Lengkong, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Gedebage, Cibiru, Panyileukan, Ujungberung, Cinambo, Arcamanik, Antapani, Mandalajati, Kiaracondong, Batununggal, Sumur Bandung, Andir, Cicendo, Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler, Coblong, Sukajadi, Sukasari, dan Cidadap. (Statistik Daerah Kota Bandung, 2020:4)

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandung

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	93.130	88.986	182.116
5-9	92.153	88.249	180.402
10-14	100.747	94.907	195.654
15-19	103.333	97.910	201.243
20-24	100.998	98.555	199.553
25-29	101.413	98.774	200.187
30-34	97.954	94.243	192.197
35-39	98.555	93.041	191.596
40-44	96.362	92.988	189.350
45-49	84.923	83.894	168.817

(Bersambung)

(Sambungan)

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
50-54	75.393	76.527	151.920
55-59	62.677	65.667	128.344
60-64	48.996	51.457	100.453
65-69	36.689	39.945	76.634
70-74	19.961	22.328	42.289
75+	17.832	25.573	43.405
Jumlah	1.231.116	1.213.044	2.444.160

(Sumber: Data diolah, BPS Kota Bandung 2020)

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa total penduduk Kota Bandung tahun 2020 berjumlah 2.444.160 jiwa dengan didominasi oleh penduduk usia 15-19 sebanyak 201.243 jiwa.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Dewasa Muda di Kota Bandung 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
20-24	100.998	98.555	199.553
25-29	101.413	98.774	200.187
Total Penduduk			399.740

(Sumber: Data diolah, BPS Kota Bandung 2020)

Penduduk Kota Bandung terdiri dari beberapa kategori salah satunya dewasa muda, kategori tersebut berkisar antara usia 20 – 29. Penduduk dewasa muda di Kota Bandung berdasarkan Tabel 1.2 sebanyak 399.740 jiwa. Dewasa muda merupakan kategori usia yang berada pada rentang usia 20 – 29 (Wheelwright, 2011:8).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam SNLKI (2017), Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan ekonomi. Kualitas sumber daya perlu terus ditingkatkan termasuk memperkuat kompetensinya, yang salah satunya terkait dengan literasi keuangan. Pengetahuan masyarakat mengenai literasi keuangan sudah menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi *life skill* yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani kehidupan dalam jangka panjang.

Di era global saat ini ilmu dan teori keuangan dalam masyarakat mengalami perubahan dalam aspek-aspek tertentu. Untuk menghadapi kondisi keuangan dalam

tingkat apapun, masyarakat perlu memahami indikator-indikator keuangan yang disebut dengan literasi keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2019), literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Peningkatan literasi keuangan telah menjadi isu global. Pemberdayaan masyarakat melalui literasi keuangan diyakini akan mendukung upaya pencapaian stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang lebih inklusif.

Masyarakat yang *well literate* lebih mudah memahami hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan serta memiliki informasi untuk mengakses industri jasa keuangan yang diperlukan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari mereka. Hal tersebut memungkinkan mereka lebih mudah dalam menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Di samping itu, masyarakat yang *well literate* cenderung memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mendukung kesejahteraan keuangan mereka. Masyarakat yang *well literate* dan *financially inclusive* akan mendukung pembangunan ekonomi bangsa. Seseorang dapat dikatakan sebagai *well literate* apabila memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, serta keterampilan dalam mengetahui fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban dari produk dan layanan jasa keuangan tersebut. (SNLKI OJK, 2017:1)

Menurut hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) tahun 2019, menunjukkan indeks literasi keuangan di Indonesia mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Persentase tersebut telah meningkat jika dibandingkan dengan survei yang dilakukan pada tahun 2016, dimana indeks literasi keuangan sebesar 29,66% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,82%.

Menurut Sanistasya (2019) literasi keuangan dan inklusi keuangan tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berdasarkan masalah-masalah keuangan yang muncul dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan literasi keuangan memfasilitasi penggunaan produk secara efektif dan membantu pelaku usaha mengembangkan

keterampilan dan produk keuangan terbaik sesuai dengan kebutuhan, kondisi tersebut sebagai syarat untuk meningkatkan inklusi keuangan.

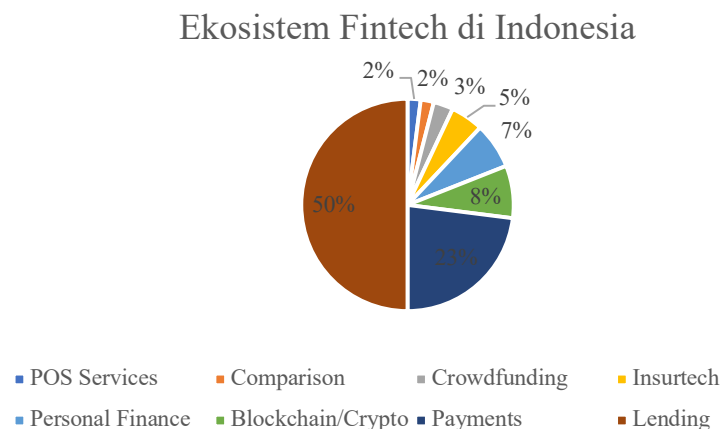
Dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Tahun 2017, rata-rata nasional indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia Tahun 2016 yaitu 29,7%. Indeks literasi keuangan masyarakat Provinsi Jawa Barat berada di atas rata-rata nasional yaitu 33,0%. Namun indeks literasi keuangan tertinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan rata-rata nasional indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia Tahun 2016 yaitu 67,8%. Indeks inklusi keuangan masyarakat provinsi Jawa Barat yaitu 71,4%, dan indeks inklusi keuangan tertinggi terdapat pada provinsi DKI Jakarta.

Dilansir dari laporan statistik Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (2019) sebagai salah satu bentuk evaluasi dan pemetaan terhadap kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, OJK melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) setiap 3 (tiga) tahun, yang dimulai sejak tahun 2013 dan dilanjutkan pada tahun 2016 serta 2019. Hasil survei tersebut menunjukkan tren yang positif terhadap tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 tingkat literasi keuangan yang hanya sebesar 21,8% meningkat menjadi 29,7% di tahun 2016 dan meningkat kembali di tahun 2019 menjadi sebesar 38,03%. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan tahun 2013 yang hanya sebesar 59,7%, meningkat menjadi 67,8% di tahun 2016 dan terus meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar 76,19%. Angka tersebut melampaui target pemerintah yang telah dicanangkan pada Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yakni tingkat literasi keuangan sebesar 35% dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yakni tingkat inklusi keuangan sebesar 75%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki target inklusi keuangan mencapai 90% pada tahun 2024.

Selain literasi keuangan, ada faktor lain yang mempengaruhi inklusi keuangan yaitu *financial technology*. Di era global saat ini dengan perkembangan teknologi informasi dan juga didukung jaringan internet yang pesat dan stabil, terciptalah beberapa layanan keuangan digital yang mempermudah masyarakat

dalam melakukan transaksi maupun pembiayaan keuangan. Layanan keuangan digital ini disebut dengan *financial technology (fintech)*. *Financial technology* dianggap sebagai cara yang efektif untuk menyediakan peluang dalam mendorong inklusi keuangan, yaitu dengan meringankan biaya transaksi keuangan tanpa harus menyediakan layanan keuangan tradisional dalam bentuk jaringan kantor (Safira, 2020).

Distribusi perusahaan *fintech* di Indonesia pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 1.2 berdasarkan survei *Fintech News Singapore*. Masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan layanan *fintech* berbasis pinjaman dengan persentase 50% dan diikuti oleh layanan berbasis pembayaran dengan persentase 23%. Hal ini menunjukkan keberadaan *fintech* di Indonesia mampu membantu pemerintah dalam menyediakan layanan keuangan berbasis pinjaman dan pembayaran yang lebih luas dan efisien.



Gambar 1.1 Ekosistem Fintech di Indonesia

(Sumber: *Fintech News Singapore 2020*)

Perkembangan teknologi dan *fintech* di Indonesia sebaiknya diimbangi juga dengan literasi digital yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Sehingga sebagai seorang individu yang hidup dalam perkembangan *fintech* serta inklusi keuangan diperlukan sebuah literasi digital juga agar bisa berpikir secara kritis untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang ditemukan melalui media digital. Salah satu target dalam peningkatan jumlah persentase literasi keuangan dan inklusi keuangan yaitu pada

usia dewasa muda. Pada usia tersebut di anggap sebagai agen perubahan karena dapat memberikan dampak terhadap kemajuan bangsa.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang diuraikan, peneliti bermaksud menganalisa bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan pada usia dewasa muda dan apakah dengan adanya *financial technology* akan berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Hal ini menjadi alasan peneliti dalam memilih Kota Bandung khususnya dewasa muda sebagai populasi sampel. Sehingga judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Literasi Keuangan dan *Financial Technology* terhadap Inklusi Keuangan Pada Dewasa Muda di Kota Bandung”**.

1.3 Perumusan Masalah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang mengatur seluruh kegiatan di sektor keuangan memiliki tujuan dalam mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. OJK juga menyampaikan bahwa literasi keuangan akan diikuti oleh tingkat inklusi keuangan (SNLKI Revisit 2017, 2017:78).

Saat ini tingkat literasi keuangan pada masyarakat terpaut lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan. Dengan adanya hal seperti ini maka muncul dugaan bahwa banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan namun masih banyak yang belum paham dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai layanan tersebut.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan pada dewasa muda di Kota Bandung?
2. Apakah *financial technology* berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan pada dewasa muda di Kota Bandung?
3. Apakah literasi keuangan dan *financial technology* berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan pada dewasa muda di Kota Bandung?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan pada dewasa muda di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apakah *financial technology* berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan pada dewasa muda di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan dan *financial technology* berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan pada dewasa muda di Kota Bandung.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pembaca khususnya di bidang keuangan yang membutuhkan informasi terkait literasi keuangan dan *financial technology* terhadap inklusi keuangan.

1.6.2 Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga keuangan untuk mengembangkan program mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan sehingga di masa yang akan datang, literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat khususnya di Kota Bandung dapat meningkat dan merata.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang gambaran objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini, literatur yang digunakan, kerangka pemikiran, dan ruang lingkup penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III berisi mengenai tahapan penelitian, jenis penelitian, operasional variabel, skala pengukuran, jenis dan teknik pengumpulan data, teknik sampling, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi mengenai hasil dan pembahasan dari berbagai aspek, analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diharapkan sebagai rekomendasi yang bermanfaat baik bagi objek penelitian maupun pihak-pihak yang berkepentingan.